

Dampak Kerjasama Brunei Indonesia Malaysia Filipina East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) Terhadap Ekonomi Indonesia

Akhmad Rifky Setya Anugrah
Universitas Tanjungpura
akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id

Michael Devone Pangestu
Universitas Tanjungpura

Abstrak — Today's global economy is increasingly connected through various forms of economic cooperation between countries. BIMP-EAGA is a regional initiative that aims to promote economic and trade cooperation between the four member countries. This study aims to analyze the impact of BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Eastern Philippines Economic Growth Area) cooperation on the Indonesian economy. In this study, we use secondary and quantitative data analysis methods to collect information and measure the impact of BIMP-EAGA cooperation on the Indonesian economy. The data used includes statistics on trade, investment, economic growth, job creation, and other related economic sectors. The results of this analysis are expected to provide a better understanding of BIMP-EAGA's contribution to the Indonesian economy. In this study, we will also consider other factors that may affect the results such as national economic policies and external factors. It is hoped that the results of this study can provide insights for the government, policy institutions, and businesses to make better decisions in optimizing the benefits of BIMP-EAGA cooperation. In addition, this research can also serve as a basis for more effective and targeted policy development in utilizing the potential of regional cooperation to boost Indonesia's economic growth.

Keywords — BIMP-EAGA, regional cooperation, Indonesian economy, economic impact, international trade

I. PENDAHULUAN

Era Globalisasi memberikan kesempatan setiap negara untuk saling terhubung satu sama lain. Berbagai aspek Kerjasama dapat menghubungkan satu negara dengan negara lain dalam berbagai bentuk Kerjasama seperti multilateral, bilateral hingga regional. Salah satu bentuk Kerjasama internasional yang muncul sebagai dampak globalisasi adalah Kerjasama sub-regional. Bentuk Kerjasama tersebut adalah melalui pembentukan Kawasan ekonomi sub-regional yaitu *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth* (BIMP-EAGA).

Kerjasama ini melibatkan empat negara regional dalam Kawasan ASEAN dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi di Kawasan tersebut.

Kerjasama sub-regional yang telah terwujud sejak tahun 1994 ini secara spesifik melingkupi daerah-daerah dari keempat negara yang memiliki kedekatan secara geografis serta memiliki batas negara yang berdampingan. Tujuan di bentuknya Kerjasama ini adalah lebih memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi Kawasan timur negara-negara ASEAN (BIMP-

EAGA, n.d.-a). Fokus Kerjasama ini dituangkan Visi BIMP-EAGA 2025 “*Resilient, Inclusive, Sustainable and Economically competitive (R.I.S.E.)*” yang diterjemahkan dalam lima pilar yaitu *connectivity* (keterhubungan), *Food Baskets (Supply chains)*, *Tourism, Environment*, dan *Socio Cultural* (BIMP-EAGA, 2016). Secara Spesifik Riswandi (1996) mengungkapkan bahwa tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan promosi perdagangan, investasi dan pariwisata. Mengkoordinasikan rencana dan implementasi pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sector swasta. Memastikan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan dalam pembangunan Kawasan sub regional. Dan memperkuat struktur institusional dari setiap action plan Kerjasama BIMP-EAGA.

Secara teoritis, Kerjasama BIMP-EAGA adalah bentuk upaya penguatan konsep regionalisme Kawasan. Kerjasama regionalism kawasan ini memiliki potensi yang besar yaitu meliputi wilayah dengan luas 1,6 juta km² melingkupi wilayah darat dan laut. Selain itu dari sudut pandang sumberdaya manusia, negara anggota BIMP-EAGA memiliki jumlah penduduk yang berpotensi menjadi tenaga kerja yang akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi kawasan. Selain itu Posisi BIMP-EAGA yang terletak di kawasan tropis khatulistiwa memiliki limpahan sumber kekayaan letak geografis negara BIMP-EAGA yang terletak di iklim tropis, memberikan keuntungan dalam aspek kekayaan alam seperti minyak dan gas alam. Bagi Indonesia, adanya Kerjasama sub-regional ini adalah upaya untuk memperkuat basis Kerjasama ekonomi Indonesia. BIMP-EAGA berkontribusi membangun ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya saing konektivitas serta perdagangan pariwisata dan investasi. Adanya pandemic covid-19 yang memperlambat arus perkembangan ekonomi harus segera di pulihkan melalui

berbagai Kerjasama internasional, termasuk adanya Kerjasama BIMP-EAGA.

Namun dampak kerjasama sub-regional ini juga harus dapat di Analisa terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Besarnya dampak tersebut dapat mempengaruhi seberapa besar komitmen pemerintah untuk terus menjaga komitmen untuk keberlanjutan Kerjasama ini kedepan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang diberikan oleh Kerjasama sub-regional BIMP-EAGA terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan kuantitatif untuk mengumpulkan informasi dan mengukur dampak kerjasama BIMP-EAGA terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan meliputi statistik perdagangan, investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan sektor-sektor ekonomi terkait lainnya. Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi BIMP-EAGA terhadap perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil seperti kebijakan ekonomi nasional dan faktor eksternal.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, lembaga kebijakan, dan pelaku bisnis untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengoptimalkan manfaat kerjasama BIMP-EAGA. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam memanfaatkan potensi kerjasama regional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kerjasama Sub-Regional

Kerjasama sub-regional adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara dalam suatu wilayah geografis yang lebih kecil. Tujuan utama dari kerjasama sub-regional adalah untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah tersebut melalui kerjasama yang erat antara negara-negara anggota. Melalui kerjasama ini, negara-negara sub-regional berusaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan perdagangan, integrasi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia (Djalante & Maulana, 2020).

Dalam literatur, terdapat beberapa contoh kerjasama sub-regional yang berhasil, termasuk BIMP-EAGA (*Brunei-Indonesia - Malaysia - Filipina Timur Economic Growth Area*), MERCOSUR (*Mercado Común del Sur*) di Amerika Selatan, ECOWAS (*Economic Community of West African States*) di Afrika Barat, dan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) di Asia Tenggara (Jayaram & Teh, 2016).

BIMP-EAGA adalah salah satu contoh kerjasama sub-regional yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi di antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina Timur. Inisiatif ini didasarkan pada keunggulan komparatif dan potensi ekonomi masing-masing negara anggota, seperti industri perikanan, pariwisata, pertanian, dan energi. BIMP-EAGA telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi di wilayah tersebut, termasuk peningkatan perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja (Jayaram & Teh, 2016).

Penguatan Kawasan Regional melalui Kerjasama Sub-Regional (BIMP-EAGA) didasari dari pemikiran bahwa pembangunan wilayah harus berorientasi pada prinsip keterbukaan (*open regionalism*) dan bukan pada pembatasan dengan blok (*building block*). Adanya pelaksanaan dari setiap kebijakan yang di ambil di tujukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi serta mempercepat pembangunan ekonomi melalui adanya arus investasi (Kussanti, 2017).

Kussanti (2017) menjelaskan bahwa adanya pengembangan SDM dan SDA serta infrastruktur adalah untuk memastikan keberlanjutan dari Kerjasama regional yang telah berjalan. Sedangkan adanya Kerjasama sub-regional adalah bertujuan untuk memadukan kekuatan dan potensi yang lebih spesifik dimiliki oleh wilayah sehingga tercapai pertumbuhan yang dinamis. Potensi BIMP-EAGA untuk memperkuat perdagangan intra-subregional dibatasi oleh ukuran pasar yang kecil di zona ini serta pengembangan bisnis dan struktur produksi yang tidak merata. Namun, perdagangan lintas batas dan investasi di lima sektor rantai nilai yang diprioritaskan dan dipromosikan secara aktif telah berkembang secara dinamis, dan hal ini telah mendorong regionalisasi yang lebih dalam dalam aspek-aspek ekonomi BIMP-EAGA.

Artikel ini juga membahas sejauh mana kebijakan dan intervensi ASEAN telah mempengaruhi transaksi intra-subregional dalam BIMP-EAGA (Dent & Richter, 2011).

Pemerintahan Kolaboratif

Pemerintahan kolaboratif merupakan sebuah konsep mengenai tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip kolaborasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam mengatur urusan publik, pemerintah tidak menjadi satu satunya pelaku dalam mendorong kualitas

pelayanan publik. Ansell&Gash (2012) mendefinisikan pemerintahan kolaboratif yaitu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Tata kelola ini dicirikan sebagai tata kelola yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah, dengan tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Dalam tata kelola kolaboratif, badan-badan publik memprakarsai forum tersebut, dan para pesertanya termasuk aktor-aktor non-negara yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, dan bukan hanya dikonsultasikan oleh badan-badan publik. Pendekatan ini menekankan pada penyertaan perspektif yang beragam dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam membentuk kebijakan dan program publik.

Badan-badan publik dan pemangku kepentingan non-negara adalah aktor dalam tata kelola kolaboratif. Forum ini dimulai oleh badan publik, yang juga melibatkan pihak non-negara dalam proses pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan non-negara adalah orang, organisasi, atau kelompok yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, namun memiliki kepentingan dalam kebijakan atau program yang sedang dibahas. Organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, perusahaan, dan organisasi lainnya dapat termasuk dalam pemangku kepentingan ini. Tata kelola kolaboratif dicirikan oleh partisipasi para pemangku kepentingan non-negara, yang memungkinkan berbagai perspektif yang lebih luas untuk diperhitungkan selama proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan bentuk-bentuk pembuatan kebijakan konvensional, di mana para pemangku kepentingan hanya dapat diajak berkonsultasi atau diberitahu tentang keputusan, tata kelola kolaboratif memungkinkan para pemangku

kepentingan non-negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Biddle, 2017).

Namun, tantangan dalam mewujudkan tata kelola kerjasama pemerintahan kolaboratif bukan sesuatu yang sederhana. Hrelja (2016) menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai kolaborasi yang sukses antara berbagai organisasi adalah fragmentasi organisasi dan masalah koordinasi yang diakibatkan oleh reformasi kelembagaan. Kompleksitas dan sifat dinamis dari konteks kelembagaan semakin memperumit upaya kolaborasi. Selain itu, keberadaan organisasi formal dan terpisah-pisah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mencapai kolaborasi yang berfungsi dengan baik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan angkutan umum. Perbedaan tujuan dan alokasi tanggung jawab juga berkontribusi pada kebutuhan untuk kolaborasi. Secara keseluruhan, literatur menekankan pentingnya kolaborasi yang baik dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Berangkat dari hal tersebut maka harus ada pendekatan yang lebih holistik, yang berpusat pada pembangunan kepercayaan, urutan yang benar, dan temporalitas, sangat penting untuk kolaborasi yang sukses. Dengan tidak menekankan aspek formal dan berfokus pada aksi bersama dan pemahaman bersama, kolaborasi dapat mengatasi asimetri dan mengurangi ketergantungan pada para ahli (Hrelja et al., 2016).

Dalam Praktiknya, pemerintahan kolaboratif diaplikasikan dalam kerjasama sub regional BIMP-EAGA. Forum kerjasama sub regional ini mendorong keterlibatan publik yang aktif terutama bagi para pelaku usaha swasta untuk ikut terlibat menyukseskan berbagai kerjasama ekonomi antar anggota negara kerjasama. Tujuan besar dari kerjasama ini adalah memfasilitasi mobilisasi orang, barang dan jasa untuk menstimulasi ekspansi pasar sub regional.

Meningkatkan koordinasi manajemen ekosistem dan sumber daya bersama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan perkembangan infrastruktur yang mendukung adanya arus perdagangan (DOMINGUEZ, 2016).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak kerjasama BIMP-EAGA terhadap ekonomi Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena kompleks seperti dampak kerjasama regional dengan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan sudut pandang para pemangku kepentingan yang terlibat (Creswell et al., 2007).

Data dikumpulkan melalui data sekunder dari berbagai jenis sumber seperti jurnal, berita, artikel dan dokumen resmi. Analisis dokumen akan dilakukan untuk memeriksa kebijakan, laporan dan dokumen lain terkait dengan Kerjasama BIMP-EAGA dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Data yang terkumpul akan di Analisa secara tematik. Analisis tematik melibatkan proses identifikasi, kategorisasi, dan pengembangan tema-tema yang akan membantu dalam memahami dampak kerjasam BIMP-EAGA terhadap ekonomi Indonesia termasuk manfaat yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan persepsi dari berbagai pemangku kepentingan (Denzin & Lincoln, n.d.).

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif in, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak Kerjasama BIMP-EAGA terhadap ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada para pembuat kebijakan, praktisi bisnis, dan masyarakat sipil dalam

mengoptimalkan manfaat Kerjasama sub-regional ini.

IV. HASIL & PEMBAHASAN

Peran Indonesia dalam peningkatan Kerjasama BIMP-EAGA

BIMP-EAGA yang merupakan sebuah singkatan dari *Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina – East ASEAN Growth Area* merupakan suatu Kerjasama sub regional di dalam wilayah ASEAN yang melingkupi negara Brunei Darussalam, 10 provinsi di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), 3 negara bagian Malaysia yaitu Sabah, Serawak dan Labuan serta provinsi Mindanao dan palawan di Philipina. Dengan jumlah populasi mencapai 45.6 juta orang dari keempat negara memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi sub regional.

Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk di Davao City pada tahun 1994 yang ditandai dengan dilakukannya konferensi pertama yang melibatkan lebih dari seribu pengusaha dari negara anggota BIMP-EAGA. Dengan mengusung semangat pertumbuhan ekonomi kawasan, BIMP-EAGA tidak terlepas dari kerangka APEC maupun WTO (Fatimah, 2016). Focus yang di ambil dalam Kerjasama ini adalah mekanisme hubungan antar sector public dan swasta dengan tujuan pengembangan investasi dan perdagangan internasional dimana pemerintah bertindak selaku pengawas sekaligus fasilitator.

Indonesia sebagai salah satu anggota Kerjasama ini juga memiliki peran besar dalam memastikan hasil Kerjasama ini berdampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di berbagai sector seperti pariwisata, investasi dan perdagangan. Indonesia juga berperan dalam memperkuat Kerjasama ekonomi dengan cara mengidentifikasi sector-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan

regional. Dengan adanya identifikasi dan kategorisasi sektor yang jelas akan mendorong investasi dan perdagangan yang lebih terarah dan memastikan adanya peningkatan dalam sector tersebut (Affairs, 2021).

Komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat konektivitas fisik dengan negara anggota BIMP-EAGA adalah memastikan infrastruktur, transportasi serta jalan, Pelabuhan, dan bandara memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga dapat mendorong adanya arus mobilitas barang dan jasa di wilayah Kerjasama tersebut (BIMP-EAGA, n.d.-b).

Pemerintah Indonesia di bawah presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun infrastruktur Indonesia berpihak pada wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Berbagai proyek pembangunan jalan, Pelabuhan dan bandara menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia mencoba menggeser orientasi pembangunan yang semula terpusat di Jawa menuju ke wilayah lain yang masih perlu di bangun. Terakhir komitmen pembangunan ini diejawantahkan dengan adanya kebijakan pemindahan ibukota negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Hal ini semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam memastikan adanya peningkatan ekonomi yang signifikan dengan digesernya ibukota negara ke Indonesia bagian tengah maka akses dengan negara anggota BIMP-EAGA akan semakin mudah dan memperlancar arus barang dan jasa.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang dikaruniai alam yang indah dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia menjadikan Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Selain itu keanekaragaman budaya dari sabang sampai Merauke adalah identitas bangsa yang selalu dapat menjadi daya Tarik bagi para turis asing untuk dating dan mengenal keindahan alam dan budaya asli Indonesia (Affairs, 2021).

Kerjasama BIMP-EAGA membuka kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia bagian timur dengan provinsi yang terlibat dalam kerjasama tersebut seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua adalah wilayah yang di karuniai dengan keindahan alam yang melimpah. Hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah modal untuk mengembangkan paket wisata bersama, memfasilitasi perjalanan lintas batas dan meningkatkan pemasaran pariwisata regional. Selain isu-isu terkait perdagangan dan pariwisata, Indonesia juga berperan untuk bersama anggota negara BIMP-EAGA untuk mengatasi tantangan bersama yang di hadapi dalam wilayah Kerjasama seperti bencana alam, perdagangan orang, perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, pengembangan SDM. Indonesia bersama negara anggota BIMP-EAGA mendorong rencana program kerja yang efektif dan efisien.

Dampak Kerjasama BIMP-EAGA terhadap ekonomi Indonesia

Sejak disepakati tahun 1994 BIMP-EAGA merupakan Kerjasama sub regional yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Lima sektor kerja sama BIMP-EAGA yakni konektivitas (transportasi, perdagangan dan investasim TIK), ketahanan pangan, pariwisata, lingkungan serta sosial budaya dan Pendidikan telah menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak disepakatinya Kerjasama BIMP-EAGA. Total perdagangan barang yang mencapai USD 95.3 miliar atau berkontribusi sebesar 19.1 persen terhadap perdagangan gabungan dari empat anggota BIMP-EAGA, serta menyumbang USD 322,8 miliar atau 17,9 persen dari GDP gabungan anggota BIMP-EAGA (Infopublik, 2022). Data BPS menyebutkan bahwa ekspor Indonesia terhadap negara-negara ASEAN juga mengalami peningkatan dari USD (Juta)

8.026,8 menjadi 9.087,1 atau meningkat sekitar 10 persen (BPS, 2023).

Kelima sector strategis yang menjadi focus Kerjasama ekonomi tersebut diimplementasikan melalui tiga strategi yakni Kerjasama pemerintah daerah, Kerjasama sector swasta, dan Kerjasama antar individu maupun institusi. Melalui strategi ini diharapkan adanya Kerjasama antar negara lebih mengedepankan kolaborasi antar pemerintah, swasta dan individu sebagai cara efektif meningkatkan arus perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menuturkan bahwa Indonesia selama masa pandemi 2019-2020 menghadapi tantangan yang luar biasa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian. Namun dalam Kerjasama BIMP-EAGA ini beliau menyampaikan bahwa perkembangan Kerjasama cukup baik meski di masa pandemi. Beliau mengutarakan bahwa 27 proyek infrastruktur prioritas (PIPs) dengan nilai USD 21,4 miliar yang terdiri dari proyek bandara, Pelabuhan, jembatan, dan rel kereta api dari 88 proyek telah berhasil diselesaikan dan 10 proyek lagi akan diselesaikan pada tahun ini. Proyek pembangunan infrastruktur ini menurutnya akan mendukung peningkatan keterhubungan, perdagangan dan juga efisiensi logistik demi meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara anggota BIMP-EAGA (Limanseto, 2023).

Salah satu capaian implementasi BIMP-EAGA yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia adalah BIMP-EAGA Green Cities Initiative, dimana adanya komitmen bersama antar negara anggota untuk melakukan interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Barat-Serawak dan penandatanganan tiga nota kesepahaman dalam BEBC (*BIMP-EAGA Business Council*). Tujuan dari adanya kerjasama ini adalah upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama dan integrasi regional di masa depan dengan cara memperkuat institusi agar

lebih efektif dalam implementasi proyek-proyek pembangunan, serta mendorong inklusifitas dan partisipasi dari sektor lain seperti swasta (Kominfo, 2022).



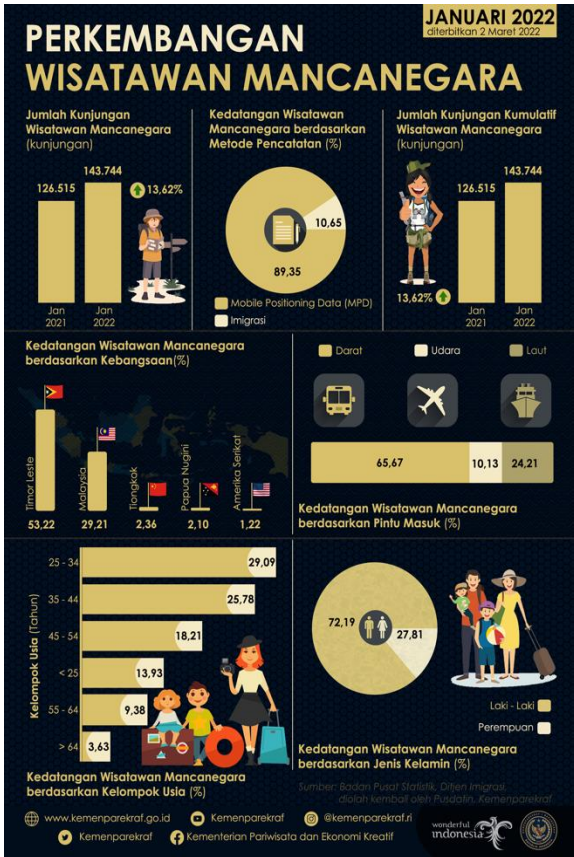
Gambar 1. Perkembangan Ekspor Juli-Agustus 2022

Kerjasama BIMP-EAGA membawa perkembangan positif terhadap perekonomian Indonesia. Terbukti data rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 yakni data perdagangan ekspor Indonesia pada bulan Agustus 2022 meningkat sebesar 9,17 persen dibanding Juli 2022 dengan nilai valuasi mencapai USD 27,91 Milliar. Peningkatan ini jauh lebih baik di dibandingkan data ekspor tahun 2021 dimana meningkat sebesar 30,15 persen.

Setianto, selaku deputi bidang statistic distribusi dan jasa menuturkan bahwa peningkatan bidang ekspor terbesar disumbang dari sector nonmigas yakni sebesar USD 26,19 miliar atau setara dengan 8,24 persen peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Selain itu bidang pertanian, kehutanan dan perikanan juga menyumbang peningkatan sebesar 17,14 persen yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi petani dan nelayan. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada periode Januari-Agustus 2022 meningkat 35,42 persen dibanding periode sebelumnya dengan valuasi sebesar USD 194,96 milar (KemenPANRB, 2022b).

Selain bidang perdagangan, sector lain yang juga merupakan focus Kerjasama anggota BIMP-EAGA adalah bidang pariwisata. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang dapat dipromosikan kepada wisatawan asing untuk datang berwisata ke Indonesia.

Gambar 2. Perkembangan Wisata Mancanegara Januari 2022



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa hingga Oktober 2022 wisatawan asing yang datang ke Indonesia telah menyentuh angka 3,92 juta. Ia mengungkapkan bahwa pemulihan sektor pariwisata setelah pandemic covid 19 berjalan baik dan optimis terjadi peningkatan pada tahun 2023 dengan target 3,5-7 juta wisatawan asing. Wisatawan yang datang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Malaysia sebagai negara anggota BIMP-EAGA menempati peringkat ke-2 dalam

menyumbang wisatawan yang datang ke Indonesia. Hal ini tentunya juga merupakan dampak langsung yang diberikan oleh Kerjasama BIMP-EAGA kepada peningkatan ekonomi pariwisata Indonesia (KemenPANRB, 2022a).

Data BPS mengungkapkan bahwa nilai devisa yang berputar di sector pariwisata Indonesia meningkat hingga USD 4,26 miliar. Nilai ini jauh melampaui pendapatan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD 0,49 miliar sebagai dampak dari pandemic covid 19. Dampak positif ini juga mempengaruhi meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang menjapai 22,89 juta orang pada tahun 2022. Dengan adanya situasi ekonomi, politik dan sosial yang stabil, pastinya akan mendorong lebih baik adanya peningkatan pendapatan nasional melalui sector pariwisata (Badan Pusat Statistik, 2022).

Gambar 3. Statistik Kunjungan Wisata Mancanegara



Kerjasama BIMP-EAGA adalah kesempatan untuk mendorong industri pariwisata Indonesia untuk lebih luas mempromosikan berbagai potensi wisata di Indonesia terutama wilayah provinsi yang menjadi bagian dari kerjasama sub regional ini seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun dalam mendorong percepatan sector pariwisata tersebut, juga harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai bagi para wisatawan baik dalam maupun luar

negeri agar menarik mereka untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Semenjak pandemi covid 19, Indonesia dan anggota negara BIMP-EAGA fokus pada pemulihan ekonomi sub kawasan. Kerjasama BIMP-EAGA menunjukkan dampak positif terhadap perbaikan ekonomi kawasan yakni GDP negara anggota tumbuh 7,1 % di tahun 2022. Selain meningkatnya GDP, tingkat pengangguran pun mengalami penurunan di angka 5,5%. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari Kerjasama dengan komitmen memulihkan perekonomian kawasan melalui Kerjasama sub kawasan (Limanseto, 2023).

Adanya kerjasama BIMP-EAGA memberikan kesempatan untuk membuka potensi perdagangan dan pariwisata Indonesia terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Provinsi yang terlibat aktif menjalin kerjasama ini seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua adalah provinsi yang sedang berkembang dan memiliki potensi besar memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk peningkatan ekonomi daerah. Selain itu komitmen untuk meningkatkan akses infrastruktur dari proyek PIPs adalah upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan membuka akses bagi negara luar yang ingin berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya integrasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, diharapkan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa yang langsung berdampak kepada masyarakat daerah tersebut.

Pertemuan BIMP-EAGA ke-24 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi kerjasama sub-Regional BIMP-EAGA ke-25. Agenda ini dihelat di provinsi Kalimantan Barat tepatnya di kota Pontianak pada tanggal 23-26 November 2022.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., memimpin langsung pertemuan Gubernur, Menteri Besar dan Kepala Daerah (CMGLF) BIMP-EAGA ke- 4 yang mengawali rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25, digelar di Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar, 2022). Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang menjadi bagian dari kerjasama BIMP-EAGA merupakan wilayah yang potensial dan penting memainkan peran dalam peningkatan ekonomi antar negara anggota. Sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan bagian negara timur Malaysia yaitu Serawak, Kalimantan Barat memastikan adanya infrastruktur yang memadai untuk peningkatan arus perdagangan, investasi dan jasa yang melalui wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Saat ini terdapat tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat yaitu PLBN Entikongdi kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas dan PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang yang telah beroperasi untuk mendukung arus lintas barang dan jasa yang melintasi wilayah Indonesia dan Malaysia. Pemerintah melalui kementerian PUPR memastikan bahwa renovasi PLBN Kalbar akan menjadi prioritas pembangunan mengingat wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dan merupakan beranda rumah bagi wilayah NKRI (Bahfein, 2021). Tahun 2022 menunjukkan dampak yang signifikan dari kerjasama BIMP-EAGA di Kalimantan Barat. Melalui program-program kerjasama yang telah diimplementasikan, terdapat beberapa aspek penting yang dapat diamati. Pertama, sektor perdagangan antara Kalimantan Barat dengan negara-negara anggota BIMP-EAGA mengalami peningkatan yang positif. Melalui peningkatan konektivitas dan penurunan hambatan perdagangan, ekspor dan impor di wilayah ini meningkat. Misalnya, ekspor produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan produk perikanan telah meningkat secara signifikan. Hal ini

memberikan kontribusi dalam menguatkan perekonomian Kalimantan Barat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusumawati & Gunawan, 2021).

Kedua, kerjasama BIMP-EAGA juga memberikan dampak positif pada sektor investasi di Kalimantan Barat. Adanya fasilitas dan insentif investasi yang diberikan oleh kerjasama ini telah menarik minat investor dalam berbagai sektor, seperti industri manufaktur, energi terbarukan, dan pariwisata. Investasi ini menciptakan lapangan kerja baru, merangsang pertumbuhan sektor ekonomi, dan berpotensi mengurangi tingkat pengangguran di wilayah ini (Djalil, 2019).

Terakhir, kerjasama BIMP-EAGA juga memberikan dampak positif pada sektor pariwisata di Kalimantan Barat. Melalui promosi dan pengembangan tujuan wisata regional, jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah ini meningkat. Wisatawan lokal dan internasional tertarik untuk menjelajahi keindahan alam Kalimantan Barat, seperti Taman Nasional Gunung Palung dan Sungai Kapuas.

Peningkatan pariwisata membawa manfaat ekonomi yang signifikan melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata, dan pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, n.d.). Dalam keseluruhan, kerjasama BIMP-EAGA tahun 2022 memberikan dampak positif yang signifikan pada Kalimantan Barat, terutama dalam sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Namun, penting untuk terus meningkatkan kerjasama ini, mengatasi tantangan yang masih ada, dan memanfaatkan potensi ekonomi penuh Kalimantan Barat dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmiji S.H.,M.H menyampaikan bahwa pertemuan BIMP-EAGA ke 25 ini merupakan momen dimana daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam kerjasama sub-kawasan yaitu menjadikan pemerintah daerah sebagai fasilitator terhadap dunia usaha bagi implementasi kebijakan. Selain itu bagi Sutamidji, sangat penting melakukan identifikasi dan memprioritaskan proyek proyek yang kengkret dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat seperti beberapa sektor (pariwisata, pertanian, energi, perdagangan dan investasi). Yang juga menjadi hal penting adalah adanya mekanisme kolaborasi yang jelas sehingga seluruh elemn dalam BIMP-EAGA termasuk para pihak swasta juga ikut ambil bagian dalam mewujudkan kesuksesan kerjasama ini (Kalbar, 2022).

Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Barat, Harrison, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak pemulihan covid 19. Pertumbuhan ekonomi Kalbar menunjukkan angka 4,78 persen dimana melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional yakni 3,59 persen pada tahun 2021.

Hal ini tentu meyakinkan bahwa Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang ingin terus meningkatkan potensi perkembangan ekonomi dan juga membuka diri terhadap kerjasama-kerjasama daerah nasional maupun internasional. Agenda tuan rumah BIMP-EAGA ini dimanfaatkan sebagai momentum dalam rangka menarik perhatian negara anggota lain bahwa Kalbar adalah salah satu provinisi yang memiliki potensi besar terutama untuk investasi dimana mendatang (Hayat, 2022).



Gambar 4. Ekspor-Impor Triwulan Kalimantan Barat

Data dari BPS menyebutkan bahwa provinsi Kalimantan Barat saat ini memiliki performa yang baik dalam perdagangan ekspor. Hingga triwulan 1 tahun 2023, provinsi Kalbar mencatatkan nilai ekspor sebesar USD 513,95 juta atau naik sekitar 18% dari triwulan sebelumnya sedangkan nilai impor sebesar USD 90,24 juta atau 2,73% turun dari triwulan sebelumnya. Tujuan ekspor Kalbar berdasarkan negara tujuan tertinggi adalah India (34,25%) dan China(30,71%), sedangkan Malaysia berada di posisi ke tiga dengan nilai valuasi sebesar USD 28,39 juta (15,24%)(BPS Kalbar, 2023).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dengan diselenggarakannya agenda pertemuan internasional ini dapat memberikan efek positif bukan hanya bagi pemerintah namun langsung bagi masyarakat mengingat prioritas kegiatan saat ini adalah pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19. Perlu adanya kerjasama

dan program yang kongkret yang di sepakati oleh masing masing negara anggota sehingga dapat langsung memberi manfaat kepada pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dampak kerjasama antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam BIMP-EAGA terhadap ekonomi Indonesia. Sebagai sebuah kerjasama Sub Regional yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun, BIMP-EAGA adalah forum yang melibatkan semua stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan arus ekonomi perdagangan barang dan jasa bagi negara negara anggota. Bagi Indonesia adanya kerjasama ini merupakan dasar bagi penentuan kebijakan yang fokus pada pemerataan pembangunan terutama di Indonesia Tengah dan Timur. Data data yang di tampilkan menunjukkan adanya dampak positif dari terjalannya kerjasama sub regional ini bagi perekonomian Indonesia.

Peningkatan perdagangan intra-regional: Kerjasama BIMP-EAGA telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perdagangan antara negara-negara anggota. Indonesia, sebagai anggota utama, telah mengalami peningkatan perdagangan bilateral dengan negara-negara tetangga di wilayah ini. Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, pengurangan hambatan perdagangan, dan kerjasama dalam mempromosikan produk dan sektor unggulan regional telah membantu meningkatkan pertukaran perdagangan yang saling menguntungkan.

Peningkatan investasi asing langsung: Kerjasama BIMP-EAGA juga telah mendorong pertumbuhan investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Dengan membentuk kawasan ekonomi yang lebih terintegrasi, investor asing merasa lebih percaya diri dalam melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Peningkatan investasi asing ini telah

berdampak positif pada pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperluas kesempatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pengembangan pariwisata regional: Kerjasama BIMP-EAGA juga telah memberikan dampak positif pada sektor pariwisata Indonesia. Langkah-langkah kolaboratif dalam mempromosikan tujuan wisata regional dan memperkuat konektivitas transportasi telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Hal ini telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata, serta peningkatan pendapatan devisa negara melalui sektor ini.

Secara keseluruhan, kerjasama BIMP-EAGA telah membawa dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Peningkatan perdagangan, investasi asing langsung, dan sektor pariwisata yang berkembang adalah bukti konkrit dari manfaat kerjasama regional ini. Namun, penting untuk terus mendorong kerjasama yang lebih erat, mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada, dan memaksimalkan potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota.

Referensi

- [1] Affairs, M. of foreign. (2021). Indonesia and BIMP-EAGA. Affairs, Indonesia Ministry of Foreign. <https://www.kemlu.go.id/en/read/information-news/2525/indonesia-and-bimp-eaga>
- [2] Ansell, C. (2012). Collaborative Governance. The Oxford Handbook of Governance, June 2018, 1-16. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>
- [3] Badan Pusat Statistik. (2022). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Indonesia. Berita Resmi Statistik, 67, 3-11.
- [4] Bahfein, S. (2021). Garda Terdepan Indonesia, Tiga PLBN di Kalimantan Barat Tuntas

Dibangun. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/20/170000621/garda-terdepan-indonesia-tiga-plbn-di-kalimantan-barat-tuntas-dibangun-?page=all>

- [5] Biddle, J. C. (2017). Improving the Effectiveness of Collaborative Governance Regimes: Lessons from Watershed Partnerships. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 143(9), 1-12. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)wr.1943-5452.0000802](https://doi.org/10.1061/(asce)wr.1943-5452.0000802)
- [6] BIMP-EAGA. (n.d.-a). History of BIMP-EAGA. Retrieved June 20, 2023, from <https://bimp-eaga.asia/index.php/about-bimp-eaga/history-bimp-eaga>
- [7] BIMP-EAGA. (n.d.-b). Indonesia. Retrieved June 6, 2023, from <http://www.bimp-eaga.org/countries/indonesia>
- [8] BIMP-EAGA. (2016). BIMP-EAGA VISION 2025. 1-23.
- [9] BPS. (2023). Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Februari 2023.
- [10] BPS Kalbar. (2023). Gambaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Barat 2023.
- [11] Creswell, J. W., Hanson, W. E., Plano, V. L. C., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236-264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- [12] Dent, C. M., & Richter, P. (2011). Sub-regional cooperation and developmental regionalism: The case of bimp-eaga. *Contemporary Southeast Asia*, 33(1), 29-55. <https://doi.org/10.1355/cs33-1b>
- [13] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (n.d.). The SAGE
- [14] Handbook of Qualitative Research.pdf. Djalante, R., & Maulana, A. K. (2020). Sub-regional Cooperation in Southeast Asia: The Case of BIMP-EAGA and IMT-GT. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 20-35.
- [15] Djalil, A. N. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 183-199.
- [16] Dominguez, P. G. (2016). Brunei Darussalam

- Indonesia Malaysia Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA). 1–23.
- [17] Fatimah, E. (2016). Dampak Kerjasama Ekonomi Regional Bimp-Eaga Terhadap Pelestarian Fungsi Hutan Di Indonesia. 1–23.
- [18] Hayat, N. (2022). BIMP-EAGA dan daya ungkit pembangunan ekonomi Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/530465/bimp-eaga-dan-daya-ungkit-pembangunan-ekonomi-kalimantan-barat>
- [19] Hrelja, R., Pettersson, F., & Westerdahl, S. (2016). The qualities needed for a successful collaboration: A contribution to the conceptual understanding of collaboration for efficient public transport. *Sustainability (Switzerland)*, 8(6). <https://doi.org/10.3390/su8060542>
- [20] Infopublik, H. (2022). Kerja Sama BIMP-EAGA Berkontribusi bagi Pembangunan Sosial Ekonomi Subkawasan. *Infopublik.Id*.
- [21] Jayaram, N., & Teh, R. M. (2016). Subregionalism and World Order: ASEAN and the EU as Regional Agents. *Cambridge Review of International Affairs*, 29(2), 629–646.
- [22] Kalbar, P. (2022). Gubernur Kalbar Pimpin PERTEMUAN CMGLF BIMP-EAGA KE-24. <https://kalbarprov.go.id/berita/gubernur-kalbar-pimpin-pertemuan-cmgf-bimp-eaga-ke-4.html>
- [23] KemenPANRB. (2022a). Hingga Oktober 2022, Jumlah Wisman ke Indonesia Capai 3,92 Juta Orang. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hingga-oktober-2022-jumlah-wisman-ke-indonesia-capai-3-92-juta-orang>
- [24] KemenPANRB. (2022b). Perkembangan Ekspor Indonesia pada Agustus 2022 Capai US\$27,91 Miliar. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perkembangan-ekspor-indonesia-pada-agustus-2022-capai-us-27-91-miliar>
- [25] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (n.d.). Peta Jalan Kerjasama BIMP-EAGA. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.marvest.co.id/berita/peta-jalan-kerjasama-bimp-eaga>
- [26] Kominfo. (2022). Dukung Daya Saing Subkawasan, BIMP-EAGA Siap Wujudkan Visi 2025. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46018/dukung-daya-saing-subkawasan-bimp-eaga-siap-wujudkan-visi-2025/0/berita>
- [27] Kussanti, D. P. (2017). Pengembangan Kerjasama Sub-Regional BIMP-EAGA Di Bidang Ekowisata : Perspektif Indonesia. *Cakrawala*, 17(2), 108–116.
- [28] Kusumawati, R., & Gunawan, A. (2021). Potensi Pengembangan Kawasan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Wilayah Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(269–288).
- [29] Limanseto, H. (2023). Pembangunan BIMP-EAGA Berkontribusi Besar Mewujudkan Kawasan ASEAN Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. *Ekon.Go.Id*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5141/pembangunan-bimp-eaga-berkontribusi-besar-mewujudkan-kawasan-asean-sebagai-pusat-pertumbuhan-ekonomi>
- [30] Riswandi, & Dam, S. (1996). *Kerjasama Asean : Latar belakang, perkembangan dan masa depan. Ghalia Indonesia*.